



Tolak Relaksasi Pajak Hotel

BPKAD hanya Beri Opsi Penundaan Pembayaran

JOGJA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan tidak akan memberikan relaksasi atau keringanan pajak kepada pengusaha hotel. Opsi yang mungkin dilakukan hanya sebatas penundaan pembayaran.

Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Jogja Kisbiyantoro menjelaskan, pajak hotel selama ini dibebankan kepada konsumen, bukan langsung ditanggung pengusaha. Karena itu, permintaan relaksasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ dianggap kurang tepat.

"Sehingga kalau kami memberikan semacam relaksasi, mungkin

hanya penundaan saja," katanya, kemarin (12/5).

Kisbiyantoro menyebut, kunjungan wisatawan ke Jogja juga masih terbilang stabil. Meski begitu, pihaknya tidak menampik adanya pergeseran preferensi wisatawan yang kini lebih memilih hotel non-bintang atau *homestay*, sehingga berdampak pada tingkat okupansi hotel berbintang.

Guna memastikan hal tersebut, dia berencana melakukan survei lapangan. Upaya tersebut dilakukan agar dapat dipastikan seberapa berdampak kebijakan efisiensi terhadap penurunan pendapatan hotel.

Dia membeberkan, hingga Mei ini untuk pendapatan pajak hotel sudah mencapai kisaran Rp 64,6 miliar atau 30,66 persen dari target Rp 210 miliar. Capaian itu termasuk pungutan pajak dari hotel berbintang, *homestay*, maupun hotel atau penginapan yang belum berizin.



Sehingga kami berharap agar pemerintah bisa memberikan keringanan pada pengusaha hotel di Kota Jogja. Misalnya dengan melakukan relaksasi pajak hingga keringanan pembayaran listrik dan air PDAM."

DEDDY PRANOWO ERYONO
Ketua PHRI DIJ

"Hotel berizin dan tidak berizin kami pungut pajaknya. Kami rutin lakukan pendataan," ujarnya.

Sebagai informasi, PHRI DIJ memang meminta agar Pemkot Jogja bisa memberikan keringanan atau relaksasi pajak. Itu menyusul kurang maksimalnya pendapatan perhotelan dalam beberapa waktu

terakhir ini.

Ketua PHRI DIJ Dedy Pranowo Eryono menyampaikan, kondisi perhotelan untuk sekarang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan, dia mengibaratkan bisnis perhotelan kini tengah memasuki masa kegelapan karena merosotnya tingkat hunian.

Kondisi tersebut terlihat selama musim libur Lebaran beberapa waktu lalu. Terhitung periode 30 Maret hingga 7 April 2025 okupansi hotel di Jogjakarta hanya menyentuh 62,8 persen. Merosotnya okupansi hotel itu juga terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Sehingga kami berharap agar pemerintah bisa memberikan keringanan pada pengusaha hotel di Kota Jogja. Misalnya dengan melakukan relaksasi pajak hingga keringanan pembayaran listrik dan air PDAM," kata Dedy belum lama ini. (**inu/wia/zi**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005